

BAB V

KESIMPULAN

MEA mulai diresmikan sejak 31 desember 2015 lalu. Setelah MEA mulai diresmikan, maka secara otomatis seluruh anggota ASEAN wajib tunduk dalam aturan yang sudah disepakati dan sudah tertulis dalam *blue print ASEAN economic community 2015*.

Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui AEC, maka dibuatlah *AEC Blueprint* yang memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam; dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

MEA adalah bentuk keseriusan ASEAN dalam mewujudkan kesejahteraan regional kawasan. Dimana ASEAN ingin menciptakan kemandirian kawasan,

dalam segala aspek. Serta berusaha untuk dapat mencukupi segala kebutuhan kawasan, sehingga aliran ekonominya akan kembali lagi untuk kesejahteraan kawasan ASEAN dan membuat ASEAN semakin solid dan maju baik dari segi sumberdaya manusianya maupun industrinya. Ketika kemandirian ekonomi kawasan ASEAN sudah kuat, maka ASEAN tidak akan terpengaruh lagi dengan produk dari negara luar ASEAN khususnya produk dari barat.

Untuk menghadapi *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat ekonomi ASEAN, Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi khususnya dari kementerian yang strategis yaitu kementerian perindustrian dan kementerian BUMN.

Kementerian Perindustrian telah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam menghadapi pasar persaingan bebas di ASEAN. Selain di bidang perdagangan barang melalui peningkatan daya saing industri dan mendorong investasi di sektor industri, pada bidang jasa melalui peningkatan SDM Industri. Peningkatan daya saing industri dilakukan melalui penguatan struktur industri dengan melengkapi struktur industri yang masih kosong dan menyiapkan strategi ofensif dan defensif dalam akses pasar.

Kementerian BUMN menyiapkan strategi sinergi, yaitu penggabungan beberapa BUMN yang memiliki jenis usaha yang sama seperti PGN dan Pertagas (Anak usaha Pertamina). Sinergi BUMN diharapkan mampu menguatkan posisi BUMN itu sendiri khususnya dalam persaingan bebas ASEAN. Disamping untuk menguatkan posisi, sinergi juga ditujukan agar penggunaan biaya produksi dan

infrastruktur dapat di tekan, sehingga Indonesia memiliki Industri yang berdaya saing tinggi dalam menghadapi MEA. Terutama dalam industri Migas, untuk menjamin ketahanan energi nasional. Dimana awalnya pemerintah menjadikan gas sebagai komoditas, dan sekarang mulai bergeser menjadikan gas sebagai alat pembangunan nasional.

PGN adalah salah satu BUMN yang diandalkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ketahanan energi nasional. PGN dalam *track record*-nya telah mencapai progres yang sangat signifikan terutama dalam peningkatan skala produk. Awalnya PGN hanya berada dala usaha hilir migas saja, namun seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional dan komitmen PGN dalam mendukung ketahanan energi nasional, maka PGN terus berinovasi dan merambah ke sektor hulu migas. Sehingga, PGN dapat mengurangi ketergantungannya terhadap produsen gas seperti Pertamina.

Keberhasilan PGN dalam dunia permigasan Indonesia diantaranya PGN telah membangun infrastruktur jaringan gas terintegrasi sepanjang lebih dari 6.700 km terbentang diseluruh Indonesia, atau setara dengan lebih dari 76% jaringan gas keseluruhan yang ada di Indonesia, dimana sebagian besar dari pembangunan infrastruktur tersebut dibangun dengan keuangan perusahaan tanpa membebani APBN. Selain itu PGN melalui anak usahanya PT. Saka Energi telah melakukan kerjasama dengan Swift Energi yaitu dengan mengakuisisi blok migas Fasken di Texas, Amerika Serikat sebesar 36%, dengan nilai total investasi sebesar 175juta dollar atau setara dengan 2 Triliun rupiah. Dimana investasi tersebut berhasil meningkatkan produktifitas shale gas sebesar 5 kali lipat dalam satu tahun

beroperasi. Dalam kerjasamanya dengan Swift Energi, PGN telah melakukan transfer pengetahuan dan pengalaman dengan menempatkan tenaga ahli PGN di perusahaan tersebut. Sehingga PGN dapat menjadikannya sebagai acuan untuk meningkatkan tata kelola dan teknologi gas Indonesia.

Dukungan penuh dari Pemerintah dan mitra bisnis seperti Pertamina dapat dimanfaatkan secara optimal oleh PGN dalam melakukan peningkatan signifikan dari jumlah pelanggan, skala produksi, bahkan ekspansi ke luar negeri. Jika Pemerintah Indonesia secara kontinyu dan tegas dalam mendukung serta memproteksi usaha migas PGN, maka bukan hanya memperoleh pemasukan dari gas PGN saja, namun juga Indonesia dapat mencapai kemandirian ketahanan energi yang berdampak pada peningkatan mutu SDM, peningkatan daya saing, serta Indonesia akan semakin disegani oleh dunia Internasional karena memiliki industri gas yang kuat dan mandiri.